

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM  
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**HARI KURNIAWAN  
BP. 03193044**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

## ABSTRAK

**Hari Kurniawan, 03193044, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pengembangan Pariwisata, 85 Halaman, Referensi 27**

Kota Padang bagian dari daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan dalam industri pariwisata. Namun pariwisata kota Padang itu masih banyak yang belum dikembangkan secara optimal maupun masih terfragmentasi pengembangannya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memenuhi persyaratan, lembaga yang masih tidak tertata dengan baik dan belum mampu melakukan kegiatan secara terkoordinasi, pengelolaan objek yang tidak dilakukan secara profesional serta komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antar stakeholder. Untuk itu pemerintah kota Padang membuat strategi pengembangan pariwisata agar pengembangan pariwisata kota Padang dapat berjalan optimal.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah kota Padang dalam pengembangan pariwisata. Dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teoritis yaitu teori strategi. Teori dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Hofer dan Schendel tentang strategi yaitu pertama ruang lingkup yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat dan swasta, kedua penerahan sumber daya yaitu penerahan sumber daya manusia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ketiga keunggulan kompetitif yaitu posisi unik yang dikembangkan oleh pemerintah dan keempat sinergi yaitu efek bersama dari penerahan sumber daya sehingga dapat bergerak secara terpadu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kota Padang dengan unit analisis lembaga. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sementara untuk keabsahan data peneliti lakukan dengan triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan teknik purposive sampling. Yang menjadi informan kunci adalah Asisten I Bagian Pemerintahan Kota Padang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Kepala Bappeda sedangkan untuk keabsahan data informannya yaitu LKAAM kota Padang, Asita, serta DPRD kota Padang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang dalam pengembangan pariwisata dilihat dari strategi Hofer dan Schendel itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditemukan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat sebagai stakeholder meskipun pemerintah menyatakan telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat tiga kali setahun. Ini membuat sinergitas antar stakeholder tidak ada. Begitu juga dengan penerahan sumber daya manusia, pemerintah kota Padang memiliki strategi internalnya yaitu pengembangan aparatur dengan memberikan pendidikan dan pelatihan namun hal ini baru diberikan kepada lima orang aparatur saja dari 50 orang aparatur.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia pada awal pemerintahan orde baru mengenal sistem sentralisasi yang berarti segala urusan pemerintahan di daerah diurus oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri melainkan hanya melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk daerah karena pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Dampak dari sentralisasi ini adanya dominasi pemerintah pusat terhadap yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Di masa orde baru sistem sentralistik ini menuai protes dari daerah-daerah karena pemerintah pusat dianggap terlalu intervensi didalam melaksanakan pembangunan daerah dan adanya ketimpangan pembangunan daerah khususnya daerah Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Masyarakat menganggap tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yakni mensejahterakan rakyat diseluruh wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Maka pada tahun 1998 pemerintahan orde baru digulingkan oleh gerakan mahasiswa yang menginginkan reformasi. Sistem sentralisasi pun berubah menjadi azas desentralisasi. Sistem desentralisasi berarti pemerintah pusat

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

memberikan sebagian tugasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah berhak mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan potensi yang ada di daerahnya.

Dengan ini maka diterbitkan Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Kebijakan otonomi daerah di daerah mengacu kepada undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menurut undang-undang ini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian daerah otonom mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2004 undang-undang no 22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi undang-undang no 32 tahun 2004. Undang-undang no 22 tahun 1999 didalam penyelenggaraannya dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan maksud reformasi yang mendambakan perbaikan.<sup>1</sup> Pemerintah sudah memiliki political will yang mana pemerintah telah memberikan otonomi daerah seluas-luasnya

---

<sup>1</sup> Syafrudin Ateng, *Kapita Selekta: hakikat otonomi dan desentralisasi dalam pembangunan daerah*. Citra Media Hukum, 2004

kepada daerah. Ini dapat dilihat adanya kewenangan pemerintah daerah dalam memprakarsai suatu kebijakan atau pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan daerah harus mengacu kepada tujuan pembangunan nasional yang mana tujuan pembangunan nasional itu mensejahterakan masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang no 32 Tahun 2004 "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional".<sup>2</sup>

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari dua bentuk jangka waktu yaitu rencana pembangunan jangka panjang yang jangka waktunya 20 tahun, merupakan visi dan misi dari pembangunan daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah yang waktunya 5 tahun ini merupakan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih baik itu dalam kebijakan maupun strategi pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi, kebijakan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan sumber daya alam sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerah.

Jadi pemerintah kota/kabupaten dapat membangun atau mengembangkan wilayah yang akan menjadi andalan daerahnya untuk dapat meningkatkan devisa

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 pasal 150 Ayat 1

demikian mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti di daerah Bali, kepariwisataan merupakan andalan daerahnya untuk dapat meningkatkan devisa. Pemerintah Bali mengembangkan kepariwisataan karena melihat potensi sumber daya alam yang ada cocok dikembangkan dalam kepariwisataan. Apalagi sesudah dikeluarkan undang-undang otonomi daerah pemerintah kota memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunan daerah yang akan menjadi andalan daerahnya. Pemerintah kota/kabupaten dianggap lebih mengetahui potensi daerahnya sendiri daripada pemerintah pusat.

Pengembangan kepariwisataan untuk dijadikan kawasan unggulan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi wisata sangat diperlukan karena ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), seperti pendapatan dari retribusi restoran hotel dan parkir. Bukan itu saja, tetapi wisatawan yang datang berkunjung, secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat perputaran uang di daerah tersebut. Pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah (tempat objek wisata). Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Sebagai tambahan dengan mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan, karena sifat dari wisatawan adalah rekreasi, melihat-lihat (sightseeing), berbelanja dan hiburan yang dikenal dengan

## BAB VI

### KESIMPULAN

Kota Padang memiliki berbagai variasi objek wisata yaitu wisata alam, wisata bahari, wisata kuno, maupun wisata budaya. Kepariwisataan kota Padang itu belum optimal dikembangkan karena masih banyaknya objek wisata yang masih terfragmentasi pengembangannya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memenuhi persyaratan, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antar stakeholder yang ada, kemudian pengelolaan objek wisata yang kurang dikelola secara profesional.

Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa dari empat faktor yang dikemukakan oleh Hofer dan Schendel ada beberapa yang tidak berjalan dengan semestinya yaitu didalam hubungan eksternal pemerintah kota Padang ternyata tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengembangan pariwisata kota Padang walaupun pemerintah kota Padang menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam tiga kali setahun. Padahal masyarakat merupakan pilar yang penting didalam pengembangan pariwisata karena masyarakat akan langsung berinteraksi dengan pariwisata. Didalam pengembangan pariwisata ada tiga domain penting yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dari tiga domain ini, mereka harus bersinergi didalam pengembangan pariwisata. Namun hal ini tidak terjadi karena

sosialisasi pariwisata kepada masyarakat tidak dilakukan oleh pemerintah kota Padang.

Sedangkan interaksi pemerintah kota Padang dengan swasta, pemerintah melakukan sosialisasi kepada swasta dengan cara berkoordinasi baik itu formil maupun non formil. Kalau formil pemerintah kota Padang mengadakan forum koordinasi dengan swasta dan untuk non formil pemerintah kota Padang melakukan dengan cara melibatkan pihak swasta secara langsung dalam event-event seperti pemilihan *uda-uni*.

Dan hubungan pemerintah kota Padang dalam internalnya. Pemerintah kota Padang melakukan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Konsolidasi ini dilakukan dengan cara melibatkan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam forum koordinasi yang dilakukan dalam tiga kali setahun.

Sedangkan untuk penerahan sumber daya manusia pemerintah kota Padang melakukan pengembangan aparaturnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Namun pemerintah kota Padang baru memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sebanyak lima orang dari 50 orang. Dengan sedikitnya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur tentunya akan berimplikasi kepada kurangnya kreatifitas aparatur terhadap pengembangan pariwisata. Jadi keunggulan kompetitif yang diharapkan dapat menarik wisatawan tidak dapat terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Syafrudin Ateng. *Kapita Selekta: hakikat otonomi dan desentralisasi dalam pembangunan daerah*. Citra Media Hukum
- Undang-Undang no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Hadinoto, Kusudianto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Universitas Indonesia, 1996, Jakarta
- Robert, Christie Mill, *The Tourism Internasional Business*, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta Utara
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2008, Berdasarkan Perda No.19 TH 2004
- Profil Daerah Kota Padang Tahun 2005-2007. Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPEDA) Kota Padang
- Mas'oe'd, Mohtar. *Ekonomi-Politik Internasional dan pembangunan*, Pustaka Pelajar, 2003 Yogyakarta
- Rahman, Aulia. *Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sector Pariwisata*. Skripsi. FISIP Unand. Padang. 2006
- Peter, Schoder. *Strategi politik*. Frederich Nauman Stifing. Jakarta. 2004
- J.Hutabarat & M Huseni. *Manajemen Strategik Kontemporer, Strategik di Tengah Operasional*.2004. Jakarta
- Daocd, Joeoef, *Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional*, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and Internasional Studies, Jakarta:1981
- R.G. Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai System linkage*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Malcong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000